

BAB V

PENUTUP

Banyaknya pembangunan Proyek Strategis Nasional yang pembangunannya termasuk dalam pembangunan berisiko tinggi dan masif membuat perlu adanya perencanaan yang matang dan perlu mempertimbangkan berbagai hal. Pembangunan ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan dan percepatan bagi Proyek Strategis Nasional. Dalam penelitian ini sudah dianalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberian kemudahan dan percepatan. Hasil yang didapat adalah peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan terhadap Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan. Dalam pasal 19 Undang-Undang 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Dengan adanya ketidaksesuaian nya peraturan perundang-undangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan membuat adanya potensi terhadap dampak dari pembangunan yang dilakukan.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila memuat asas dan tidak saling bertentangan. Berbagai asas dapat diterapkan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Asas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah asas kelestarian dan keberlanjutan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan dan fasilitas percepatan kepada pembangunan PSN secara tidak langsung membuat asas kelestarian dan keberlanjutan menjadi tidak dipertimbangkan. Peraturan yang "dibungkus" seakan-akan membuat negara maju dan mementingkan investasi saja, suatu saat akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai negara yang memiliki otoritas dan tanggungjawab dalam mengelola sumber daya dan segala lingkungan yang ada di wilayah nya, langkah-

langkah yang diambil oleh para pemerintah seharusnya memikirkan keberlanjutan dan kualitas dari lingkungan yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Dampak dari pembangunan memang tidak dapat dirasakan langsung, tetapi dengan adanya peraturan yang memuat berbagai asas dengan tujuan untuk melindungi kebutuhan untuk generasi yang akan datang, lingkungan dan sumber daya yang dimiliki negara Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, keselarasan antara asas dan peraturan perundang-undangan ini menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum secara efektif dan efisien. Dengan adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan pada PSN dan asas kelestarian dan keberlanjutan akan membuat kualitas lingkungan menjadi rusak. Oleh karena itu, tujuan untuk melestarikan lingkungan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan. Dengan adanya hukum dan penerapan asas dalam suatu peraturan, tujuan negara dalam menjaga lingkungan dapat tercapai. Hal ini merupakan upaya preventif dalam konteks menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Apabila dalam pembangunan memiliki dampak negatif, maka pemerintah dapat mencoba berbagai solusi dan evaluasi terhadap pembangunan yang sudah dilakukan. Salah satu cara penyelesaian permasalahan ini dapat mengajukan pengujian undang-undang mengenai pemberian kemudahan, pendekatan ekonomi, dan meningkatkan perhatian publik agar permasalahan ini mendapat perhatian dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Efani, I. A., Manzilati, A., Tiarantika, R., Pi, S., Rahmawati, A., & Pi, S. (2023). *BISNIS, LINGKUNGAN HIDUP, DAN ETIKA*. UB Media.

Emil, S. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta

I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 8-9.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011 *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Binacipta, Jakarta, hlm. 6

Putra, IM (2023). *Pembangunan Daerah*. Media Prokreatif.

JURNAL

Ahmad Jazuli, *DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015,
https://www.academia.edu/download/56206351/ART_1_JRV_4.2_WAT_ER.pdf

Afonso C. Castro¹, Angelica B. Alvim¹ Mackenzie Presbyterian University, College of Architecture and Urbanism. Rua Itambé, 143 - Prédio 9. Higienópolis, São Paulo SP., Brazi
<https://www.proquest.com/docview/2560839771/D8D3BCB90A9D44B4PQ/38?accountid=31495&sourcetype=Scholarly%20Journals>

Ario Danang Pambudhi et.al., 2021 *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk*

Mendukung Keberlanjutan Ekologis. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/313>

Dalila Doman, Nadia Doman, 2020 *Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020* Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/222>

Faris Faza Ghaniyyu, Nurlina Husnita, 2020 *Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup.* Universitas Padjajaran.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/21/>

Hastuti, Surya Dini, 2019 *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Untuk Usaha.* Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. <https://repository.unair.ac.id/97232/>

H. SUHENI, REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN, semarang, 2021.
<https://www.proquest.com/docview/2734703742/857EC24749894CCFPQ/7?accountid=31495&sourcetype=Dissertations%20&%20Theses>

Rofi Wahanisa, "KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA." Vol.6, Oktober 2021, hal 97.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2993446&val=26927&title=KONSEPSI%20ASAS%20KELESTARIAN%20DAN%20KEBERLANJUTAN%20DALAM%20PERLINDUNGAN%20DAN%20PENGELOLAAN%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20DALAM%20NILAI%20PANCASILA>

Rokilah, Sulasno “*PENERAPAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*”, banten, Desember 2021, diakses pada 21 Maret 2024 <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/3942-Article%20Text-15176-1-10-20211229.pdf>

Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha, 2020 *URGENSI PENERAPAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI KONTROL DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN DI INDONESIA*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/8545>

Sujadi, Suparjo. 2018 Februari *kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
<https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/68>,

Dewa Kadek Michel Habel Zefanya, *MEKANISME HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. November 2023
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/issue/view/4842>

Cekli Setya Pratiwi, “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK>

Barnabas Dumas Manery, “Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi” Volume 23 Nomor 2, Desember 2017
<https://media.neliti.com/media/publications/316074-makna-dan-fungsi-itikad-baik-dalam-kontr-cb663b61.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

MEDIA

Nelayan was-was lingkungan rusak kalau ada kawasan industri di pulau rempang, <https://www.mongabay.co.id/2023/10/30/nelayan-was-was-lingkungan-rusak-kalau-ada-kawasan-industri-di-pulau-rempang/>

Kala hutan dipaksa mengalah demi proyek strategis nasional <https://theconversation.com/kala-hutan-dipaksa-mengalah-demi-proyek-strategis-nasional-167071>

Maluku Utara: Pulau Kaya yang Tak Putus Dirundung Bencana, <https://betahita.id/news/detail/9713/maluku-utara-pulau-kaya-yang-tak-putus-dirundung-bencana.html?v=1704406791>

Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44684/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng/>

KPPIP TETAPKAN 30 PROYEK INFRASTRUKTUR PRIORITAS, <https://kppip.go.id/berita/2634-2/>

Pemerintah Memberikan Kemudahan untuk Proyek Strategis Nasional, <https://pro.hukumonline.com/a/lt6076911d0997e/pemerintah-memberikan-kemudahan-untuk-proyek-strategis-nasional/>

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS, <https://kppip.go.id/tentang-kppip/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

Food Estate Jokowi Dicap Gagal, Ini Daftar 12 Lokasinya, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124125358-4-508585/heboh-food-estate-jokowi-dicap-gagal-ini-daftar-12-lokasinya> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup <https://www.mongabay.co.id/2020/12/14/walhi-nilai-proyek-strategis-nasional-rawan-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

What is Environmental Sustainability? Goals with Examples, <https://www.snhu.edu/about-us/newsroom/stem/what-is-environmental-sustainability> diakses pada 18 Maret 2024

What is Sustainability? <https://www.epa.gov/sustainability/learn-about-sustainability> Diakses pada 18 Maret 2024

Peluncuran Catatan Kritis: Atas Nama Proyek Strategis Nasional: Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Tertindas, <https://kontras.org/2024/01/21/peluncuran-catatan-kritis-atas-nama-proyek-strategis-nasional-ruang-hidup-dirampas-masyarakat-tertindas-2/> , diakses pada 21 Maret 2024

RPP tentang kemudahan berusaha bagi proyek strategis nasional dalam penyusunan, <https://nasional.kontan.co.id/news/rpp-tentang-kemudahan-berusaha-bagi-proyek-strategis-nasional-dalam-penyusunan?page=all> , diakses pada 21 Maret 2024

Proyek Strategis Nasional, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Proyek_Strategis_Nasional, diakses pada 22 Maret 2024

Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan Berdampak Luas, <https://www.ekon.go.id> , diakses pada 22 Maret 2024

Sistem Jalan Raya Antar Negara Bagian,
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem Jalan Raya Antar Negara Bagian \(Amerika Serikat\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem_Jalan_Raya_Antar_Negara_Bagian_(Amerika_Serikat)), Diakses pada 19 April 2024

US history shows spending on infrastructure doesn't always end well,
<https://theconversation.com/us-history-shows-spending-on-infrastructure-doesnt-always-end-well-165653> , diakses tanggal 19 April 2024

Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja,
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32840/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-era-baru-berusaha-untuk-perluasan-lapangan-kerja/0/berita> , diakses tanggal 19 April 2024

Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju
[https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan pembangunan infrastruktur dan indonesia maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju) diakses pada 2 Mei 2024

Prestasi pembangunan infrastruktur di era sby,
<https://www.demokrat.or.id/prestasi-pembangunan-infrastruktur-di-era-sby/> diakses pada 2 Mei 2024

SBY berhasil bangun infrastruktur nasional dan ekonomi rakyat,
<https://news.detik.com/berita/d-2723302/pd-sby-berhasil-bangun-infrastruktur-nasional-dan-ekonomi-rakyat> , diakses pada 2 Mei 2024

Percepatan pembangunan proyek strategis nasional mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, <https://kppip.go.id/berita/percepatan-pembangunan-proyek-strategis-nasional-mendukung-pertumbuhan-ekonomi-nasional/> diakses pada 2 Mei 2024

Proyek Strategis Nasional Terus Dilanjutkan untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5449/proyek-strategis-nasional->

[terus-dilanjutkan-untuk-pembangunan-inklusif-di-indonesia](#) diakses pada 3 Mei
2024